



Pengaruh Pariwisata, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Perimbangan, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Deni Himawan¹, Lilis Siti Badriah^{2*}, Goro Binardjo³

^{1, 2*, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Corresponding Author: lilis.badriah@unsoed.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
Diterima: 26 Agustus 2025	<i>Poverty remains a challenge in the Special Region of Yogyakarta (DIY) despite tourism development and transfer funds from the central government. Human development through improvements in the Human Development Index (HDI) is also part of the poverty reduction strategy. This study examines the effects of tourism, HDI, balancing funds, and village funds on poverty levels in five districts/cities of DIY during 2016–2023 using panel data regression with the Fixed Effect Model. The results show tourism and HDI significantly reduce poverty, balancing funds have no significant effect, while village funds increase poverty levels. These findings imply the need for inclusive tourism development, stronger human capital through HDI, and better governance and targeting of transfer funds, especially village funds, so they can effectively support poverty reduction.</i>
Disetujui: 29 September 2025	
Dipublikasikan: 1 Oktober 2025	
Kata Kunci: Kemiskinan, Pariwisata, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Perimbangan, Dana Desa	

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi persoalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meskipun sektor pariwisata berkembang dan dana transfer dari pemerintah pusat telah dialokasikan. Peningkatan kualitas manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pariwisata, IPM, dana perimbangan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten/kota DIY periode 2016–2023 dengan metode regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model. Hasil menunjukkan pariwisata dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak berpengaruh, sedangkan dana desa berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan pariwisata yang inklusif, penguatan pembangunan manusia melalui peningkatan IPM, serta perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran dana transfer, khususnya dana desa, agar efektif menekan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah kompleks bagi setiap negara di dunia. Kemiskinan menjadi indikator bahwa masyarakat tidak berada dalam kondisi sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan (Purnama, 2017). Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk dituntaskan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dalam tingkat nasional. BPS (2023) mencatat bahwa pada 2019 sampai 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 25,1 juta jiwa menjadi 27,5 yang diperparah dengan kondisi pandemi *covid-19*. Pandemi *covid-19* memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memicu peningkatan pengangguran serta penurunan pendapatan masyarakat (Setyadi & Indriyani, 2021). Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan pada tahun 2022 hingga 2023 seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, angka kemiskinan pada tahun 2023 masih tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, yakni pada tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan masalah kemiskinan yang dihadapi antara daerah satu dan lainnya berbeda-beda. Berikut di bawah ini adalah kondisi kemiskinan berdasarkan pulau di Indonesia :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau di Indonesia, 2019-2022

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa	12.555,90	14.752,02	14.023,52	13.106,92	13.621,34
Sumatera	4.767,52	5.851,53	5.862,66	5.763,42	5.669,17
Sulawesi	1.988,76	2.061,51	2.007,08	2.030,71	2.042,89
Papua	1.108,50	1.127,45	2.093,04	1.537,42	1.515,54
Kalimantan	961,52	1.016,10	975,41	995,86	963,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 1. menunjukkan Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi diantara pulau lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah penting di Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa menjadi sentral pembangunan tetapi hal ini tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Pulau Jawa belum merata sehingga belum mencapai tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara detail persentase tingkat kemiskinan di Pulau Jawa berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2019-2022

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
DKI Jakarta	3,44	4,61	4,69	4,65	4,44	4,366
Jawa Barat	6,86	8,15	8,18	7,92	7,62	7,746
Jawa Tengah	10,69	11,62	11,52	10,95	10,77	11,11
DI. Yogyakarta	11,57	12,54	12,35	11,41	11,04	11,78
Jawa Timur	10,28	11,27	10,99	10,43	10,35	10,66
Banten	5,01	6,27	6,58	6,2	6,17	6,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan DI Yogyakarta adalah 11,78 persen dan menjadi paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat DIY juga merupakan daerah dengan capaian IPM yang tinggi serta mempunyai potensi pariwisata yang baik dalam skala nasional.

Terdapat banyak faktor yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain potensi wisata setiap daerah Zainuri *et al.*, (2021). Zhao, (2021); Khan *et al.*, (2020); Winter & Kim, (2021) menjelaskan bahwa sektor pariwisata berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. DI Yogyakarta dikenal dengan sektor wisatanya yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Destinasi wisata tersebut memiliki keunikan tersendiri dengan budaya Yogyakarta yang sangat kental dan peninggalan bersejarah yang menjadikan DI Yogyakarta memiliki potensi pariwisata dari berbagai sektor seperti keindahan alam, seni, budaya, kuliner, dan tempat bersejarah (Adhitya *et al.*, 2020). Sektor pariwisata ini akan menjadi sektor yang mendukung untuk pemerintah daerah untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Selain sektor pariwisata, pengentasan kemiskinan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (Isnaini *et al.*, 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang merepresentasikan kualitas SDM di suatu daerah. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan SDM yang berkualitas dan mampu menunjang kehidupan pada taraf yang lebih tinggi. Ini disebabkan karena SDM yang berkualitas akan memiliki produktivitas lebih tinggi dibanding SDM dengan kualitas yang lebih rendah. Penelitian Andhykha *et al.*, (2018) juga menunjukkan bahwa IPM dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan. Sementara itu, penelitian Zein & Septiani, (2024) menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Pelaksanaan otonomi yang diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan karena memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya serta perumusan kebijakan pembangunan (Shahid *et al.*, 2022). Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yaitu kebijakan kebebasan pengelolaan keuangan daerah serta pemberian transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung berjalannya desentralisasi fiskal tersebut. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sementara dana desa disalurkan langsung ke pemerintah desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian Sofilda & Hamzah, (2015) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti bahwa DAU memberikan kontribusi kepada pengentasan kemiskinan. Selain DAU, penelitian Gumelar, (2021) menunjukan bahwa DAK berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah yang berarti bahwa DAK dapat memberikan dampak kepada penurunan kemiskinan. Lebih lanjut Nany *et al.*, (2022) juga menemukan bahwa DBH memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya tingginya perolehan DBH dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, penelitian Tselios & Rodríguez-Pose, (2024) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal efektif untuk menurunkan kemiskinan hanya pada wilayah perkotaan dengan tata kelola yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan tetapi juga dapat memperbesar ketimpangan pendapatan antar masyarakat (Zhang *et al.*, 2024; Muhlisin *et al.*, 2025). Gavriluță *et al.*, (2020) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali tidak efektif sehingga kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan kurang optimal. Selain dana perimbangan, transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah juga dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa dilaksanakan pertama kali setelah disahkannya UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada tahun 2015. Pada dasarnya pengalokasian dana desa menjadi upaya mewujudkan desentralisasi fiskal dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Paska *et al.*, (2025) menyebutkan bahwa dana desa secara optimal menekan angka kemiskinan pada periode sebelum terjadi pandemi *Covid-19*, namun setelah pandemi *covid-19* dana desa tidak mampu menekan tingkat kemiskinan. Aziz, (2017) juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana desa masih dinyatakan belum efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penelitian Arham & Rauf, (2020) memberikan temuan yang berlawanan dengan tujuan transfer dana desa yang tidak signifikan membantu mengurangi ketimpangan, karena penggunaan dana tersebut cenderung berpihak pada aparatur desa atau kerabatnya secara pribadi. Berdasarkan analisis penelitian terdahulu ditemukan inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pariwisata, indeks pembangunan manusia, dana perimbangan dan dana desa dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh pariwisata, IPM, dana perimbangan dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan khususnya di lima kabupaten/kota di DIY selama periode 2016–2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data penelitian terdiri dari data tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan dalam regresi data panel melalui *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test* (Rifkhan, 2023). *Chow Test* dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila nilai *p-value* < 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0,05 maka model yang terpilih adalah CEM. *Hausman Test* dilakukan untuk menguji model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila nilai *p-value* < 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0,05 maka model yang terpilih adalah REM. Terakhir, *Lagrange Multiplier Test* dilakukan untuk menguji antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (FEM). Apabila nilai *p-value* < 0,05 maka model yang terpilih adalah REM, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0,05 maka model yang terpilih adalah CEM.

Selain melalui pemilihan model terbaik, model penelitian harus memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian BLUE dapat melalui uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Gujarati, 2013). Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai satuan yang tidak sama. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi data ke dalam bentuk *logaritma natural* (Ln) sehingga hasil penelitian dapat mencapai kondisi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Secara spesifik formula transformasi data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$LnKEM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnPAR_{it} + \beta_2 LnIPM_{it} + \beta_3 LnPER_{3it} + \beta_4 LnDD_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan :

KEM : Kemiskinan

β : Koefisien regresi

PAR : Pariwisata

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PER : Dana Perimbangan

DD : Dana Desa

e : *Error*

i : wilayah yang diteliti

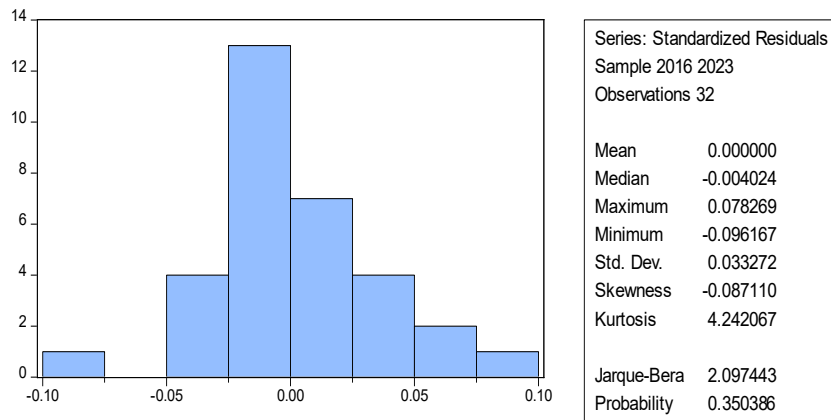
t : Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas (Data Diolah, 2024)

Gambar 1. menunjukkan bahwa nilai *p-value* pada uji normalitas adalah $0,350 > 0,05$ dapat diartikan penelitian ini lolos uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolienaritas (*VIF*)

Variabel	<i>VIF</i>
PAR	1,518
IPM	1,543
PER	1,598
DD	1,515

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024

Tabel 3. menunjukan bahwa nilai *VIF* < 10 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolienaritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>t</i>	<i>P-Value</i>
C	-1,424	0,167
PAR	1,472	0,153
IPM	0,570	0,573
PER	1,235	0,228
DD	-0,677	0,504

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai *p-value* pada setiap variabel memiliki nilai $> 0,05$ yang berarti bahwa model dalam penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
<i>Durbin-Watson (D)</i>	1,625
<i>dL</i>	1,176
<i>dU</i>	1,732

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024

Tabel 5. menunjukkan $dL < D < dU$ yaitu $1,1769 < 1,6935 < 1,7323$. Kriteria ini memberikan arti bahwa tidak terdapat keputusan. Pada analisis regresi data panel uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang dapat diabaikan karena data panel bersifat gabungan antara *cross section* dan *time series* (Basuki & Yuliadi, 2014).

2. Uji Pemilihan Model

a. Uji Chow

Tabel 6. Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	125,879	(3,24)	0,000
<i>Cross-section Chi-square</i>	90,159	3	0,000

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024

Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai *p-value* uji chow adalah $0,000 < 0,05$. Artinya model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman

Tabel 7. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	15,104	4	0,004

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai *p-value* uji hausman adalah $0,004 < 0,05$. Artinya model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model terbaik yang digunakan untuk penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model*.

3. Hasil Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Regresi Berganda Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	30,222	5,295	5,706	0,000
LNPAR	-0,024	0,011	-2,107	0,045
LNIPM	-5,656	1,105	-5,118	0,000
LNPER	-0,201	0,161	-1,244	0,225
LNDD	0,268	0,079	3,398	0,002
<i>Adjusted R-squared</i>				0,974
<i>F-statistic</i>				167,735
<i>Prob(F-statistic)</i>				0,000
<i>Durbin-Watson stat</i>				1,625

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025

$$\widehat{KEM} = 30,222 - 0,0240PAR - 5,656IPM - 0,201PER + 0,268DD$$

Berdasarkan persamaan diatas berikut merupakan penjelasan model regresi data panel:

- Koefisien bernilai 30,222 yang memiliki arti bahwa jika pariwisata, IPM, dana perimbangan dan dana desa bernilai nol maka kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta adalah 30,22 persen.
- Pariwisata memiliki $0,045 < 0,05$ dan koefisien bernilai -0,024. Hal ini berarti jika pariwisata naik 1 persen maka kemiskinan akan turun 0,024 persen.
- IPM memiliki $0,000 < 0,05$ dan koefisien bernilai -5,656. Hal ini berarti jika IPM naik 1 persen maka kemiskinan akan menurun 5,656 persen.
- Dana perimbangan memiliki $0,225 > 0,05$ dan koefisien bernilai -0,201. Hal ini berarti dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- Dana desa memiliki $0,002 < 0,05$ dan koefisien bernilai 0,268. Hal ini berarti jika dana desa naik 1 persen maka kemiskinan akan naik 0,268 persen.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Kriteria	Nilai
<i>Adjusted R-squared</i>	0,974

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024

Tabel 9. menunjukkan nilai *adjusted r-square* adalah 0,974. Hal ini memberikan arti pariwisata, IPM, dana perimbangan, dan dana desa dapat menjelaskan sebesar 97,4 persen terhadap variasi kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan terdapat 2,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

5. Uji Statistik

a. Uji t-Statistik

Merujuk pada Tabel 8. diketahui bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini secara parsial adalah sebagai berikut :

- Pariwisata memiliki koefisien negatif yaitu -0,024 dan nilai p-value yaitu $0,045 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
- IPM memiliki koefisien negatif -5,656 yaitu dan nilai p-value $0,000 < 0,05$ yang berarti IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
- Dana perimbangan memiliki koefisien negatif yaitu -0,201 dan nilai p-value $0,225 > 0,05$ yang berarti bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
- Dana desa memiliki koefisien positif yaitu 0,268 dan nilai p-value $0,002 < 0,05$. Oleh karena koefisien positif maka dapat diartikan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

a. Uji F-Statistik

Tabel 10. Uji F-Statistik

Kriteria	Nilai
<i>F-statistic</i>	167,735
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025

Tabel 10. menunjukkan bahwa nilai *p-value* pada uji F adalah $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel pariwisata, IPM, dana perimbangan, dan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

6. Uji Elastisitas

Tabel 11. Uji Elastisitas

<i>Variable</i>	Elastisitas	Keterangan Hasil Penelitian
PAR	-0,024	Berpengaruh signifikan
IPM	-5,656	Berpengaruh signifikan
PER	-0,201	Tidak Berpengaruh
DD	0,268	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025

Tabel 11. menunjukkan bahwa pariwisata, IPM, dana perimbangan dan dana desa merupakan variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai elastisitas tertinggi adalah IPM yaitu 5,656. Hal ini dapat diartikan bahwa IPM merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa pariwisata dapat menekan tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Pariwisata menjadi sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di DI Yogyakarta. Tersempatnya tenaga kerja secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan hidup layak bagi masyarakat, sehingga kondisi kemiskinan di DI Yogyakarta akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuri *et al.*, (2021); Folarin & Adeniyi, (2020) yang menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian Sudiarta & Suardana (2016) menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Bali memiliki dampak kepada keterbukaan-nya lapangan kerja sehingga berpotensi menekan kemiskinan.

Selain pariwisata, modal manusia yang tercermin dari IPM juga terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas SDM yang baik, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. SDM yang berkualitas mampu berpikir kritis, berinovasi, dan mengambil peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Berbekal kemampuan tersebut, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan produktif dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan inilah yang menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zuhdiyati *et al.*, (2015); Gumede, (2021) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya peningkatan IPM berdampak pada penurunan kemiskinan.

Tingginya tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta mengindikasikan bahwa pembangunan daerah belum merata. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi fiskal kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Temuan ini sejalan dengan Canare, (2020) yang menjelaskan bahwa kontribusi desentralisasi fiskal belum secara optimal menekan tingkat kemiskinan. Dana perimbangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiganya memiliki karakteristik dan mekanisme penggunaan yang berbeda. DAU bersifat *block grant* yang cenderung digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah, seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan cenderung tidak langsung (Aini & Suharto, 2024). Sementara itu, DAK merupakan *specific grant* yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Realisasi DAK untuk pembangunan fisik menyebabkan DAK tidak mampu menekan tingkat kemiskinan secara langsung (Ika *et al.*, 2020).

Adapun DBH merupakan bagian dari penerimaan pajak pusat yang dibagikan kepada daerah, seperti pajak penghasilan dan sumber daya alam, tanpa kewajiban penggunaannya untuk program tertentu. Akibatnya, pemanfaatan DBH tidak selalu diarahkan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan secara langsung. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dana perimbangan secara agregat tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dana perimbangan berperan dalam mendukung pembangunan daerah, kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu untuk memberikan dampak nyata melalui perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik secara bertahap. Penelitian ini sejalan dengan Aini & Suharto, (2024) juga menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain dana perimbangan, transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah direalisasikan dengan pemberian dana desa. Dana desa dialokasikan langsung kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Namun, hasil analisis menunjukkan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa selama periode 2016–2023 cenderung diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Dana desa dialokasikan untuk memperkuat pembangunan tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam implementasinya, alokasi dana desa belum secara langsung menjangkau kelompok miskin. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, penggunaan dana desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas umum lainnya (Permatasari, 2024). Jenis realisasi seperti ini bersifat jangka panjang dan tidak langsung berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, terutama dalam periode waktu yang singkat.

Selanjutnya, mekanisme distribusi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Meskipun tingkat kemiskinan termasuk dalam formula perhitungan, namun bobotnya tidak terlalu besar. Akibatnya, desa dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi belum tentu menerima dana lebih banyak dibandingkan dengan desa yang memiliki penduduk miskin lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembagian dana desa belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di setiap wilayah. Ketidaksesuaian ini membuat kebijakan pembagian dana desa menjadi kurang tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin, sehingga membatasi peran dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan. Kelemahan dalam tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia desa juga memperlemah efektivitas pemanfaatan dana desa. Studi Kotta *et al.*, (2024) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa masih rendah sehingga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaannya belum optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin justru tidak dimanfaatkan secara produktif. Meski studi tersebut bersifat lokal, temuan ini dapat merefleksikan tantangan serupa di banyak desa di wilayah DIY.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2019) menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Kondisi ini disebabkan oleh sebaran penduduk miskin di desa yang tidak sebanding dengan jumlah perolehan

dana. Penyelewengan realisasi dana desa juga menjadi sebab tidak efisiennya dana desa dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian Aziz, (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak efektif untuk menekan tingkat kemiskinan karena perangkat desa belum memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik, serta rendahnya peran masyarakat secara aktif dalam realisasi dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pariwisata dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta, dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya, IPM merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah dapat mengambil langkah strategis secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari pelatihan, pengembangan komunitas, pembangunan infrastruktur, promosi produk lokal, sehingga pariwisata lebih optimal untuk menekan tingkat kemiskinan. Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah dapat mengimplementasikan program pelatihan kerja, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat. Terciptanya kualitas SDM memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan. Lebih lanjut berkaitan dengan dana desa, kontribusi dana desa harus dapat menekan tingkat kemiskinan daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan penggunaan dana desa yang bisa secara langsung menyentuh masyarakat miskin dan memastikan distribusi dana desa difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan pelatihan dan pembekalan untuk aparatur desa terkait efektivitas pengelolaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adhista, M. (2022). Analisis Ekspor, Impor, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Nilai Tukar Rupiah. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 73-92. <https://ejournal.unimaju.ac.id/index.php/GJIEP/article/view/7>
- Asriyani, Sumarni, T., & Saifullah. (2024). Determinan Nilai Tukar Rupiah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal MBISKU: Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 1(1), 29-40. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/MBISKU/article/view/624>
- Bolung, D., Syafri, & Ratnawati, N. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs, Jumlah Uang Beredar, Ekspor, dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 249-258. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15404>
- Damani, Dr. A., & Vora, V. (2018). An Empirical and Analytical Study of the Factors Affecting the Exchange Rate Fluctuation in India *International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities (IJSSH)* An Empirical and Analytical Study of the Factors Affecting the Exchange Rate Fluctuation in India. *International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities (IJSSH)*, 3(3), 1-14. www.ijssh.org
- Demak, U., Kumaat, R., & Mandeij, D. (2018). Pengaruh Suku Bunga Deposito, Jumlah Uang Beredar, dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 181-192.
- Dzakriyah, Z., Puspitaningtyas, Z., & Puspita, Y. (2018). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor dan Tingkat Inflasi Terhadap Kurs Rupiah Tahun 2009-2016. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 6(2), 104-110. <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/IPSB/article/view/559>
- Dornbusch, R. and Fischer, S. (2018) *Macroeconomics*. 3rd Edition, McGraw-Hill, New York.
- Fahmi, A. (2019). Pengaruh Capital Inflow, Inflasi, Suku Bunga, Ekspor, dan Impor Terhadap Nilai

- Tukar Rupiah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 16(1), 40–50.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Fauji, D. A. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 2013 - Triwulan I 2015. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 1(2), 64–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29407/nusamba.v1i2.458>
- Gujarati, D. N. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5 ed.). Solo: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2019. *Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Gondaliya, V., & Dave, P. (2015). The Impact Of Exports and Imports On Exchange Rates In India. *International Journal of Banking, Finance & Digital Marketing*, 1(1), 1–8. www.arseam.com
- Hamilton, J.D. (1983) Oil and the Macro-Economy Since World War II. *Journal of Political Economy*, 91, 228–248. <https://doi.org/10.1086/261140>
- Hong Nguyen, N., Dang Nguyen, H., Kim Vo, L. T., & Khanh Tran, C. Q. (2021). The Impact of Exchange Rate on Exports and Imports: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Busines*, 8(5), 61–68.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0061>
- Kartikaningsih. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Food and Beverage Di Masa Pandemi COVID-19. *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(2), 133–139.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>
- Krugman, P. R. (2022). *International economics: Theory and policy*. New York: Prentice Hall.
- Madesha, W., Chidoko, C., & Zivanomoyo, J. (2013). Empirical Test of the Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Zimbabwe. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(1), 52–58. www.iiste.org
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of Macroeconomics*, 6th Edition. South-Western: Cengage Learning.
- Mishkin, F.S. (2019) *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 10th Edition, Pearson Education, New York.
- Murni, A. (2006) *Ekonomika Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustika, C., Umiyati, E., & Achmad, E. (2015). Analisis Pengaruh Ekspor Neto Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 292–302.
- Muzakky, A., Suhadak, & Topowijono. (2015). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Pendapatan Per Kapita, dan Ekspor Terhadap Nilai Tukar Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 23(1), 1–9. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi moneter dan bank-sentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopirin. (2013). *Ekonomi Moneter* Buku II Edisi Kesatu. Yogyakarta: BPFE
- Nyambariga, M. D. (2017). Effects Of Exchange Rate Volatility On Imports and Exports In Kenya. *International Journal of Economics*, 2(5), 71–84. www.iprjb.org
- Oluyemi, O., & Isaac, E. D. (2017). The Effect of Exchange Rate on Imports and Exports in Nigeria from January 1996 to June 2015. *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 3(2), 66–77. www.iiardpub.org
- Patosa, J. B., & Cruz, A. T. (2012). Factors Affecting Exchange Rate Movements In Selected Asian Countries. <https://www.researchgate.net/publication/283981216>
- Perry, W. dan Solikin. 2003. *Seri Kebangk-sentralan No.6: Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: PPSK-BI
- Qarina. (2023). Analisis Determinan Nilai Tukar Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(2), 369–380.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.562>
- Rahman, H., Majumder, S. C., & Hossain, M. N. (2020). The Impact of Exchange Rate Volatility on Export and Import in Bangladesh. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*,

- 9(2), 411–424. <http://www.european-science.com>
- Salvatore, D. (2011). *International Economics Trade and Finance*. Wiley.
- Santosa, A. B., & Nawatmi, S. (2023). *Monograf Nilai Tukar Rupiah: Purchasing Power Parity*. Sleman: Deepublish.
- Sasono, H.B. (2013). *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sedyaningrum, M., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006:IV-2015:III. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 34(1), 114–121. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Septiawan, D. A., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Tahun 2007-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 40(2), 130–138. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Silitonga, R. B., Ishak, Z., & Mukhlis. (2017). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8821>
- Simanjuntak, E. (2015). Analisis Paritas Daya Beli Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 242–253. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2001. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sukirno, S. (2015) *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi, Edi. 2017. *Ekspor Impor*. https://www.google.co.id/books/edition/Ekspor_Impor_Perdagangan_Internasional_E/I6yzeaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Perdagangan+Internasional+adalah&printsec=frontcover (June 29, 2022).
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2022). Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses: *Handbook of Central Banking Studies* (p. 280). Springer Nature.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Ekonisia.
- Wijatmoko, (2009). Eko Wijatmoko, *Jurnal FE UI*, 2009.
- Wilya, S. (2015). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Capital Account Terhadap Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar Amerika Serikat Periode Tahun 2001-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–10. <https://www.neliti.com/publications/120459/pengaruh-produk-domestik-bruto-inflasi-dan-capital-account-terhadap-nilai-tukar#cite>
- Yuliyanti, I. N. (2014). Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2), Tingkat Suku Bunga SBI, Impor, dan Cadangan Devisa Terhadap Nilai Tukar Rupiah/Dolar Amerika Tahun 2001-2013. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 284–292. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>